



Internalisasi Budaya Nusantara dalam Pendidikan menuju Kepemimpinan Ideal

Abstract

The ideal leadership is one of the conditions the formation of social order required dignified preparation of various circles that central to the community it self. Today, our country is experiencing a crisis of leadership ideal. It proved to corruption still rampant. To meet the ideal of leadership in this country, premises must prepare the nation's cultural character generation without circum scribed by traditions and culture outside.

Kepemimpinan yang ideal merupakan salah satu syarat terbentuknya tatanan masyarakat yang bermartabat yang diperlukan persiapan matang dari berbagai kalangan yang sentralnya pada masyarakat itu sendiri. Kini, negeri kita tengah mengalami krisis kepemimpinan ideal. Itu terbukti dengan KKN yang masih meraja lela. Untuk menyongsong kepemimpinan yang ideal di negeri ini, Indoensia harus mempersiapkan generasi yang berkarakter kebudayaan bangsa tanpa terkungkung oleh tradisi dan budaya luar.

Kata kunci: Internalisasi, budaya nusantara, pendidikan, kepemimpinan ideal.

Oleh

Muhammad War'i

Wakil Direktur LKP2M Periode 2013

Mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Maliki Malang

Akmaly.warok@gmail.com / warokakmaly.blogspot.com

Pendahuluan

Pemimpin yang bermartabat tentunya menjadi impian seluruh manusia di manapun berada, begitupun di Indonesia. Hanya saja, harapan untuk mendapatkan pemimpin bermartabat seperti panggang yang jauh dari api. Setiap momen pemilihan umum, kita selalu disuguhkan dengan wacana-wacana progresif terkait masa depan bangsa. Namun demikian, kenyataan pahit yang kini masih memeluk keadaan kita seolah menjadi sinyal negatif, bahwa kita selama ini hanya berjalan di tempat. Sistem perpolitikan kita tak lebih dari konsep mati

yang hanya sebatas formalitas bagi sebuah negara demokrasi¹.

Kesadaran akan posisi kaum elit politik sebagai tulang punggung tegaknya demokrasi tak serta merta membawa kita menuju rekonstruksi paradigma politik yang lebih sehat. Tarik-menarik kepentingan antar partai politik masih saja menjadi pemandangan dalam implementasi birokrasi di negeri ini. Orientasi yang demikian pincang salah satunya disebabkan oleh para aktor di tubuh partai politik itu sendiri.

¹ Asep Nurjaman. dkk. *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006) Hal. v - x

Dengan demikian, salah satu cara untuk memperbaiki perpolitikan bangsa Indonesia saat ini adalah dengan mempersiapkan para aktor-aktor yang memiliki kapasitas secara keilmuan dan moral secara karakter individual.

Cerita buram para pejabat negara sudah banyak kita dengar di media-media massa. Kadangkala atraksi-atraksi antagonistik tak jarang mewarnai hubungan antara rakyat dan pejabat. Masih begitu sering kita dengar rakyat yang merusak kantor-kantor pemerintah karena ketidakbecusan pejabat yang terkait. Atau tentang korupsi yang merajalela di tataran elit pemerintah. Semuanya membawa kita kepada pemandangan sesak dan sikap pesimistik atas proses demokrasi di negeri ini. Dan sering kali muncul sebagai perlawanan adalah sikap apatisme yang disebabkan rasa penat dan bosan melihat semua itu. Hal tersebut tentu akan berakibat tidak baik pada eksistensi bangsa. Rongrongan dari berbagai doktrinasi yang kontra dengan NKRI akan menjadikan wacana tersebut sebagai ajang untuk menjastifikasi ideologi mereka².

Di samping itu, kenyataan pelik yang kita temukan di realitas pendidikan kita saat ini adalah peserta didik yang tidak lagi mencerminkan manusia yang terdidik. Mereka semakin beringas dan tidak mengenal aturan. Sudah biasa kita saksikan di acara-acara berita di televisi tawuran antar pelajar. Baik yang di ibu kota Jakarta maupun di banyak daerah-daerah di Indonesia. Begitupun juga dengan tingkah-tingkah amoral lainnya seperti seks bebas dan kriminalitas. Semua ini membuat kita miris

² Misalnya saja, organisasi-organisasi yang membawa wacana khilafah atau negara islam berlandaskan syariat islam.

dan prihatin. Padahal jika kita menilik sejarah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki karakter kemanusiaan yang bagus dan menghargai harmoni sosial. Itu semua terbukti dari sekian bentuk budaya yang dimiliki bangsa ini. Maka dengan demikian, ada yang salah dengan proses pendidikan kita.

Menkaji tulisan Radhar Panca Dhana beberapa hari yang lalu di koran *Kompas* tentang dunia pendidikan kita saat ini. Tulisan tersebut berjudul "Pendidikan Pecundang". Dalam tulisan itu, Radhar menulis bagaimana keadaan peserta didik saat ini adalah warisan dari pendidikan orde baru yang hanya terpaku pada materi-materi sentralistik yang menghasilkan peserta didik prematur. Artinya, kapasitas peserta didik dalam hal intelektualitas tidak maksimal, bahkan cendrung salah produk. Misalnya saja Viky yang terkenal dengan "vikiisme" yang merupakan simbol kebobrokan pendidikan kita. Ataupun juga dengan si Doel yang terlibat kecelakaan maut. Bagi Radhar itulah salah satu hasil pendidikan kita saat ini. Dan hal tersebut tentunya dibutuhkan evaluasi oleh negara³.

Proses pendidikan seharusnya diarahkan tidak hanya menuju lapangan ke-intelektualan, tapi juga menuju lautan moral yang bersih. Sehingga peserta didik mampu menyerap pengetahuannya secara baik untuk kepentingan masa depan dan mampu mengolah spiritualitasnya untuk kesalehan horizontal. Untuk melakukan hal ini tentunya dibutuhkan sinergisitas budaya di dalam pendidikan itu sendiri. Hal ini mengingat pentingnya menanamkan karakter budaya

³ Radhar Panca Dhana. *Pendidikan Pecundang*. Kompas edisi 17 September 2013

bangsa pada diri peserta didik. Sehingga kedepannya diharapkan muncul generasi-generasi cerdas yang memiliki karakter kebudayaan yang khas Indonesia dan mampu menjawab mimpi bangsa memperoleh pemimpin yang ideal.

Kepemimpinan ideal

Kepemimpinan merupakan kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotifasi dan memungkinkan pengikut untuk memberikan kontribusi terhadap efektivitas dan kesuksesan komunitas⁴. Tambahan pula, kepemimpinan membutuhkan kewibawaan seorang pemimpin sehingga mampu memberikan dampak persuasif dalam implementasi setiap kebijakan.

Kepemimpinan dalam hal ini adalah suatu hal yang menunjukkan pada keadaan pantas seseorang untuk mengatur suatu komunitas (negara). Maka dari itu, tentunya seorang pemimpin harus memiliki karakter yang memungkinkan dia untuk dihormati dalam sebuah komunitas. Hal demikian karena seseorang secara psikologis akan lebih patuh pada perintah atau intruksi seseorang yang memiliki latar budaya yang sama dengan mereka.

Di negara kita, tentunya pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang memiliki karakter sebagaimana budaya yang ada di Indonesia (nusantara). Berbicara budaya nusantara tentunya berbicara perangkat sosial yang cukup rumit dan kompleks. Ini mengingat bangsa Indonesia sebagai negara yang penuh dengan keragaman budaya. Kepemimpinan ideal dengan demikian, merupakan keadaan pemerintahan yang

⁴ House dkk, dalam teori dan perilaku organisasi (malang, UIN Maliki Press. 2008) hal 195

dipimpin oleh seorang yang bijaksana dan mampu memahami dengan utuh objek yang dipimpinnya sehingga mampu membawa harapan-harapan dan mimpi masa depan yang dimiliki oleh rakyatnya. Bangsa Indonesia dalam hal ini masih begitu jauh dari model kepemimpinan yang seperti itu. indikator yang menunjukkan hal tersebut sudah cukup jelas, tidak meratanya perekonomian negara, kolepnya sistem budaya dan pendidikan kita serta semakin merajalelanya aktifitas korupatif para birokrasi negara.

Ada beberapa karakter orang agar bisa menduduki posisi pemimpin ideal. Dibutuhkan karakter yang benar-benar kuat serta pemahaman yang mendalam tentang masyarakat dan negara, agar dia bisa berdiri sebagai pengayom bangsa yang tidak hanya bermodal pencitraan dan topeng media, tapi benar-benar bentuk asli yang bisa merangkul semua elemen masyarakat. Karakter yang seperti inilah yang kelak mampu berdiri di keragaman bangsa Indonesia serta mampu mewadahi semua aspirasi secara objektif dan merata. Ini penting mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang dibalut keragaman budaya dan nilai dalam masyarakatnya.

Melalui hal ini, maka sekiranya penting dilakukan kajian terkait masa depan politik bangsa Indonesia dengan pemimpin bermartabat yang kelak hadir sebagai jawaban dari mimpi-mimpi rakyat Indonesia. Bukan berarti saat ini pemimpin kita jauh dari karakter pemimpin ideal, tapi hasil yang dicapai menggambarkan bahwa kepemimpinan di negeri ini masih belum bisa berdiri dengan utuh dan objektif. Pemimpin negara masih terkesan berdiri di lahan golongan atau partainya saja.

Sehingga lahan-lahan lain yang sebenarnya penting untuk pengembangan negara tak tersentuh dan terbengkalai.

Berangkat dari hal tersebut, maka sekiranya penting untuk meniti langkah-langkah menuju era pemimpin-pemimpin yang bermartabat, yakni para pemimpin yang memiliki ketulusan dalam mengabdi kepada masyarakat dan benar-benar sebagai penyambung lidah masyarakat. Artinya mereka yang menjadi pemimpin tidak justru menjadi penindas dan pengambil hak-hak rakyat. Tentunya hal ini dibutuhkan proses yang tidak sedikit dan butuh keseriusan dan komitmen dari berbagai kalangan. Dari pemerintah sendiri maupun lokal masyarakat.

Ada beberapa komponen yang harus kita persiapkan untuk mempersiapkan pemimpin yang bermartabat. Diantaranya: pendidikan, kebudayaan dan humanisme yang tinggi. Pendidikan menjadi penting karena secara formal maupun non formal dia menjadi syarat dari segala karir di kehidupan ini. Secara formal, seseorang membutuhkan pengakuan (ijazah) untuk kepentingan studi maupun kerja. Dan secara non formal pemimpin dituntut pintar dan cerdas. Kemudian, seorang pemimpin juga harus memiliki nilai budaya yang kuat. Dalam hal ini, budaya bangsa Indonesia harus benar-benar melekat dan menjadi karakternya, sehingga akan berimplikasi kepada warga yang dipimpinnya. Warga yang dipimpin akan menemukan sosok panutan dari pemimpin mereka. Adapun yang terakhir adalah humanisme. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa humanisme yang tinggi sehingga mampu merangkul seluruh rakyatnya tanpa pandang bulu.

Evaluasi bidang pendidikan

Sebagai langkah solutif, kita mesti melakukan pemberahan dalam bidang pendidikan. Ini mengingat pendidikan sebagai sentral dan penentu perbaikan untuk masa depan. Namun demikian, tidak cukup dengan perbaikan pendidikan secara independen, melainkan konsep pendidikan harus disinergikan dengan budaya yang ada. Dalam hal ini bangsa Indonesia harus menggali nilai-nilai budaya yang mereka miliki, agar mampu menjadi ruh dalam proses pendidikan bangsa. Mekanisme ini memang membutuhkan waktu yang lama dan intens karena berbicara budaya adalah berbicara piranti halus dalam diri manusia yang itu hanya bisa disentuh melalui kesadaran diri. Untuk membangkitkan kesadaran diri terhadap budaya sendiri, dibutuhkan semangat mencintai identitas diri dan tidak terbuai dengan kebudayaan luar.

Jika kita *flashback* ke masa lampau, situasi pendidikan kita saat ini yang akultural adalah situasi pendidikan kita pada awal kemerdekaan. Dimana pada awal kemerdekaan, bangsa kita mengalami virus alienasi yakni keterasingan dari budaya sendiri. Ini merupakan implikasi logis dari proses kolonialisme yang begitu panjang. Diantara rasa keterasingan tersebut berupa: meragukan hakekat diri sendiri, ragu akan penentuan tempatnya di tengah lingkungan, ragu pada bahasa Ibu dan pengalaman eksistensial kaum serta bangsa sendiri, dan yang paling parah terasing dari kebudayaan sendiri, dengan akibat terjadinya urbanisasi secara massal.⁵ Yang menjadi pertanyaan adalah, jika dulu kita mengalami alienasi

5 Kartini Kartono. *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. 1990. Bandung: Mandar Maju. Hal 30

karena baru merdeka, maka apakah setelah 68 tahun bangsa ini merdeka, kita masih dikungkung kebudayaan luar?

Secara formal akademik, barangkali kita telah menyusun banyak materi sebagai standarisasi dan kodifikasi terhadap kebudayaan yang kita miliki, namun apakah kebudayaan terbatas pada dialektika konsep? Berbicara budaya seharusnya berbicara aplikasi. Artinya kebudayaan bangsa kita tidak mungkin terinternalisasikan dengan sendirinya tanpa kemauan dari semua warga negara. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penegak administrasi pendidikan harus membentuk kegiatan-kegiatan atau pun program yang sifatnya mengajak seluruh warga negara menyerap nilai kebudayaan yang dimiliki agar nilai-nilai budaya bisa terinternalisasikan pada sikap dan tingkah laku warga negara, dalam hal ini adalah peserta didik. Kenapa ini penting, karena sesungguhnya akar dari kebobrokan pendidikan kita saat ini adalah aninternalisasi kebudayaan sendiri (budaya nusantara) terhadap pendidikan kita dewasa ini.

Salah satu hal yang melatarini memang tidak bisa kita pungkiri adalah pengaruh kolonialisme, namun kini kita harus segera merancang langkah dan teknik agar mampu keluar dari lingkaran setan masa lalu yang telah mengembargo kita dari kebebasan mengekspresikan kebudayaan sendiri sehingga kita kehilangan jati diri. Kembali mengkaji nilai-nilai sendiri adalah langkah bijak untuk kembali menjadi bangsa yang sadar dan menyerap identitas sendiri, tidak berjiwa dengan ruh budaya lain.

Budaya nusantara sebagai ruh pendidikan bangsa

Budaya nusantara atau dalam istilahnya Ki Hajar Dewantara adalah kebudayaan nasional merupakan kebudayaan puncak dari budaya-budaya yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Budaya nusantara dengan demikian adalah identitas bangsa indonesia yang berakar pada keragaman yang dimilikinya karena adanya cita-cita dan harapan yang sama, yakni kejayaan dan kesejahteraan bangsa. Dengan demikian, budaya nusantara sebagai ruh pendidikan berarti menjadikan nilai-nilai budaya nusantara sebagai sinergi bagi pendidikan formal, yang kemudian diharapkan terinternalisasikan di dalam jiwa peserta didik sehingga mampu menjadi generasi yang peduli kepada bangsa sendiri juga mampu untuk mengerakkan roda kepemimpinan ketika masa mereka sampai pada hal itu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah dan seluruh kalangan yang bergerak untuk menjalankan roda pendidikan harus memiliki komitmen yang kuat dalam memasukkan kebudayaan nusantara dalam materi pendidikannya, yang mana sifatnya adalah materi aplikasi, artinya peserta didik diarahkan untuk mengimplementasikan kebudayaan yang mereka miliki dengan suka rela. Jika hal ini berhasil, maka apa yang disebut sebagai pendidikan karakter akan menempuh hasil yang maksimal.

Salah satu gerakan pemerintah yang juga harus diminimalisir adalah gerakan penerapan modernisasi pendidikan menurut pola luar. Dalam hal ini keberadaan sekolah-sekolah yang lebih berkarakter kebaratan bisa dijadikan contoh. Kebijakan ini tentu

akan membawa pada pengadopsian budaya luar dan kurang menyertakan unsur-unsur budaya asli serta aspirasi lokal dan regional⁶. Implikasi dari kebijakan ini adalah munculnya mental-mental peserta didik yang tidak berkarakter bangsa sendiri tapi justru berjiwa budaya luar. Sistem pendidikan seperti ini sebenarnya sudah dulu disindir oleh Robert S. *President World Bank Group* (1974) yang menyatakan bahwa negara-negara berkembang dalam sistem pendidikan masih saja terkungkung dengan kebudayaan kolonial yang pernah menjajahnya⁷.

Dari data di atas, berarti salah satu yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk memperbaiki peserta didiknya adalah dengan memperbaiki pendidikannya serta tidak lupa pada ruh pendidikan berupa kebudayaan asli milik sendiri (budaya nusantara). Dengan demikian, nantinya akan terbentuk suatu generasi cerdas secara intelektual dan memiliki kesalehan sosial secara horizontal yang terbangung melalui penghayatan yang mendalam dan internalisasi dari kebudayaannya.

Internalisasi Kebudayaan nusantara dalam pendidikan

Ada beberapa hal teknis yang mesti dilakukan pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam rangka menginternalisasikan kebudayaan nusantara dalam pendidikan guna membentuk kepemimpinan yang ideal. *Pertama*, masyarakat harus sadar akan nilai-nilai kebudayaan luhur yang mereka miliki dan mau menggali dan mengkaji milik mereka itu sehingga proses

internalisasi lebih efektif dan merupakan kesadaran individual. Mekanisme ini tentunya didasarkan dengan daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Artinya, setiap kebudayaan daerah yang ada memiliki kewajiban untuk mengkaji kebudayaan lokal mereka. Kedua, dari sisi regulasi, pemerintah harus mensistematisasikan kurikulum kebudayaan berbasis lokal genius sehingga mampu menjadi payung hukum dan penekanan yang sifatnya intsruktif dari pemerintah. Harapannya, dengan regulasi yang ada, proses internalisasi akan semakin tersistematiskan.

Selanjutnya, semua pihak juga memulai internalisasi budaya yang berorientasi pendidikan sedini mungkin. Yakni dengan cara mengenalkan kebudayaan-kebudayaan daerah kepada peserta didik, mengarahkan anak-anak untuk mencintai kebudayaan sendiri. Salah satu untuk menopang ini adalah budaya bercerita cerita rakyat. Dalam hal ini kisah-kisah tentang pemimpin perkasa yang pernah dimiliki nusantara atau daerah kerajaan masa lalu daerah terkait masing-masing. Seperti misalnya cerita tentang Gajah Mada, Sidharta Gautama dan lainnya. Ini bertujuan untuk menanamkan sikap kepemimpinan dan mampu membawa aspirasi seluruh rakyatnya. Dengan demikian, harapan akan terbentuknya pemimpin yang bermental seperti yang diharapkan bisa tercapai.

Penutup

Untuk memulai internalisasi budaya dalam pendidikan seyogyanya dimulai sejak dini agar hasil yang dihasilkan lebih efektif dan mampu bertahan dari segala

⁶ Ibid. Hal 31

⁷ Ibid. Hal 33

penyakit zaman seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini mengingat kita sudah terikat dalam lingkaran setan KKN sehingga sangat sulit untuk memberangus virus tersebut. Di samping itu, mengingat kebudayaan lokal juga memiliki senyawa yang namanya *local genius* yang mana fungsi darinya adalah untuk mengantisipasi, menyaring, bahkan mentransformasikan berbagai bentuk pengaruh budaya luar sehingga sesuai dengan ciri-ciri masyarakat lokal. Makin kuat daya tahan kearifan lokalnya, maka masyarakat yang bersangkutan makin stabil. Dengan demikian, untuk menjadikan budaya sebagai nyawa dalam pendidikan, maka kebudayaan juga harus disucikan dari pengaruh luar, ini untuk memastikan bahwa budaya yang akan kita masukkan dalam pendidikan benar-benar karakter bangsa dan akhirnya mampu membentuk generasi kepemimpinan yang ideal, yakni

kepemimpinan yang akan membawa indonesia lebih cemerlang.

Referensi

- Nurjaman, Asep, dkk. 2006. *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kartono , Kartini. 1990. *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Mandar Maju
- Dhana, Radhar Panca. *Pendidikan Pecundang*. Kompas edisi 17 september 2013
- Ratna, Nyoman Kutha. 2011. *Antropologi Sastra, Peranan Unsur-Unsur Kebudayaan Dalam Proses Kreatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siswanto dan sucipto.2008. *Teori dan Prilaku Organisasi*.Malang: UIN Maliki Press